



PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KINERJA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SUKAGALIH KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT

Muhammad Rakhmat²; Aji Abdul wahid²

¹ Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut

² Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut

Abstrak

Belum maksimalnya kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan disinyalir akibat dari tidak optimalnya koordinasi di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini adalah menemukan data dan informasi mengenai besarnya pengaruh koordinasi terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausalitas dengan teknik pengumpulan data kuesioner yang disebarakan kepada 13 responden.

Berdasarkan analisis statistik, terbukti adanya hubungan yang kuat antara koordinasi terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh koordinasi terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

Kata kunci: Koordinasi, Kinerja petugas, Pajak bumi dan bangunan

1 Pendahuluan

Menurut PERDA No. 27 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut Kelurahan merupakan Perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah kelurahan sesuai dengan tugas yang dilimpahkan oleh camat.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka pemerintahan Kelurahan memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal ini yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah Lurah sebagai pemimpin dalam Pemerintahan Kelurahan. Bagaimana seorang pemimpin harus mampu menggerakkan aparatur Kelurahan sebagai bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tujuan organisasi Pemerintahan Kelurahan dapat tercapai yang nantinya akan menunjang terhadap tujuan nasional.

Sesuai dengan fungsinya seorang pemimpin harus dapat menjadi koordinator bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Koordinasi yang dimaksud merupakan bagian dari fungsi manajemen yang maksudnya adalah seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Kelurahan harus mampu mengatur, mengarahkan dan membimbing bawahan atau anggota organisasinya agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari bawah sampai tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. Upaya koordinasi sangat dibutuhkan mengingat setiap individu memiliki motivasi yang berlainan satu sama lain dalam setiap kegiatan agar tidak mengakibatkan gejolak yang negative dan menimbulkan hambatan yang berarti pada kelancaran pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.

Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul belum maksimal hal ini dapat terlihat dari proses koordinasi yang dilakukan oleh lurah dan hasil kinerja aparatur Kelurahan khususnya kolektor Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi dan kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan serta pengaruh koordinasi terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut.

2 Kajian Teori

Menurut Brech (Hasibuan, 2014) mengemukakan bahwa “koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing – masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Kemudian menurut Terry (Hasibuan, 2014) mendefinisikan koordinasi adalah “ suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.

Penetapan indikator Koordinasi menurut Abdurahman (2003) yaitu di identifikasikan sebagai berikut : 1) Prinsip Efisiensi, 2) Prinsip Satu arah, 3) Prinsip partisipasi, 4) Prinsip ketepatan, 5) Prinsip koordinasi strategis.

Menurut Mangkunegara (2006) “kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Sementara menurut Wirawan (2009) “mengatakan kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi fungsi atau indikator indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu”.

Penetapan Indikator Kinerja menurut (Dwiyanto, 2008) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

2) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

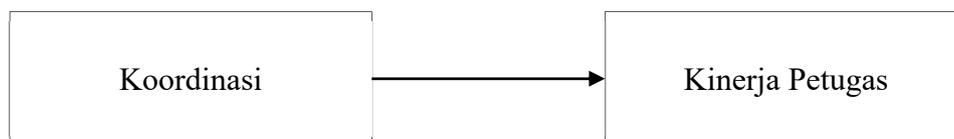
3) Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang implicit maupun yang eksplisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada waktu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, terlihat jelas bahwa koordinasi sangat mempengaruhi kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan. Koordinasi yang baik bertujuan untuk memberikan peningkatan kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang maksimal. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah koordinasi berpengaruh terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan tarogong Kidul Kabupaten Garut. Adapun model penelitian disajikan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Model Penelitian

3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kausalitas, yang mana deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel yang diteliti sedangkan kausalitas untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner yang disusun secara terstruktur. Alat ukur penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ilmiah.

3.1 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yang terdiri dari satu variabel bebas atau independen (variabel x) yaitu Koordinasi dan satu variabel terikat atau dependen (variabel y) yaitu Kinerja petugas. Selanjutnya, disusun operasional variabel penelitian sebagai berikut.

Tabel 1: Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Variabel (X) Koordinasi (Abdurahman, 2003)	Prinsip Efisiensi	Waktu
		Tenaga
	Prinsip Satu arah	Tujuan
		Program
	Prinsip partisipasi	Materil
		Non materil
	Prinsip ketepatan	Tujuan
Sasaran		
Prinsip koordinasi strategis	Tepat	
	Cepat	
Variabel (Y) Kinerja Pegawai (Dwiyanto, 2008)	Produktivitas	Efisiensi pelayanan
		Efektivitas pelayanan
		Keterampilan
		Sikap kerja
	Responsivitas	Mengenali kebutuhan masyarakat
		Menyusun agenda
		Prioritas pelayanan
		Mengembangkan program program pelayanan publik
	Akuntabilitas	Kebijakan organisasi publik
		Kegiatan organisasi public
Responsibilitas	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip prinsip administrasi	

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang berjumlah 13 orang.

3.3 Alat Ukur dan Instrumen Penelitian

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa kuisisioner yang sudah disusun secara terstruktur. Kuisisioner bersifat tertutup dimana responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Item pertanyaan dirancang berdasarkan tingkat pengukuran variabel yang bersifat ordinal dan kategori jawabannya terdiri dari lima tingkatan dengan skala perbedaan semantic dengan gradasi dari sangat baik sampai dengan sangat kurang baik dengan skor 1-5.

3.4 Teknik Analisis Data

Jenis data yang diteliti mencakup data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif didasarkan pada hasil wawancara dan observasi, data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir ilmiah, yakni melalui penarikan kesimpulan secara logis, sistematis, cermat dan akurat berdasarkan kaidah – kaidah berfikir logis. Sedangkan data kuantitatif bersumber pada hasil penyebaran angket kepada responden. Data tersebut dianalisis secara statistic dengan

menggunakan analisis non parametric dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi rank spearman. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh koordinasi terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam persentase, maka digunakan analisis regresi.

4 Hasil dan Implikasi

4.1 Pengujian Variabel Koordinasi

Penulis sajikan mengenai tanggapan responden untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah dalam meningkatkan efektivitas kerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari angket yang penulis sebarakan kepada seluruh respnden yang berjumlah sebanyak tiga belas orang sebagai staf kelurahan dan Ketua Rukun Warga (RW) yang sekaligus sebagai kolektor petugas pemungut pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan teknik sensus.

Berdasarkan tanggapan responden dari setiap indikator dimensi Pengaruh Koordinasi yang dilakukan Lurah Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang baik, hal ini ditampilkan oleh jumlah responden terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul.

4.2 Pengujian Variabel Kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan

Pelaksanaan aktivitas suatu organisasi akan berjalan dengan baik manakala ditunjang oleh berbagai faktor yang ada didalamnya. Pencapaian target pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Karena dengan keadaan bagaimanapun pajak merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh masyarakat dalam menunjang pembangunan.

Walaupun memang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh kolektor sudah mengikut prosedur dalam pemungutan tetapi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan pemungutan pajak tidak berjalan dengan efektif.

Untuk mengetahui kondisi Variabel Kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 14 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai dengan menurut responden.

Tanggapan responden dari setiap indikator kinerja petugas rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang baik terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Hal ini terbukti dengan diperolehnya tingkat total rata-rata tanggapan responden terhadap kinerja petugas.

4.3 Pengujian Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil penghitungan skor jawaban responden dan analisa ternyata terdapat pengaruh yang positif antara koordinasi terhadap kinerja petugas di kantor Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Predikat terdapat pengaruh yang positif ini berdasarkan interpretasi koefisien korelasi berada pada kategori sedang.

5 Kesimpulan

- a) Berdasarkan tanggapan responden dari setiap indikator dimensi Pengaruh Koordinasi yang dilakukan Lurah Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang baik, hal ini ditampilkan oleh jumlah responden terhadap kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul. Hal ini terbukti dengan diperolehnya tingkat total rata-rata tanggapan responden terhadap koordinasi
- b) Sedangkan tanggapan responden dari setiap indikator kinerja petugas rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang baik terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Hal ini terbukti dengan diperolehnya tingkat total rata-rata tanggapan responden terhadap kinerja petugas.
- c) Berdasarkan hasil penghitungan skor jawaban responden dan analisa ternyata terdapat pengaruh yang positif antara koordinasi terhadap kinerja petugas di kantor Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Predikat terdapat pengaruh yang positif ini berdasarkan interpretasi koefisien korelasi berada pada kategori sedang.

6 Rekomendasi

- a) Dalam rangka meningkatkan kinerja maka lebih meningkatkan pelaksanaan koordinasi.
- b) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi hendaknya memperhatikan teknik-teknik koordinasi, prinsip-prinsip koordinasi agar berjalan secara efektif dan efisien, juga harus berkesinambungan dan bersifat objektif.
- c) Peningkatan kinerja petugas untuk meningkatkan prestasi kerja agar target hendaknya dapat ditingkatkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. d. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mangkunegara, A. P. (2008). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Riduwan. (2006). *Dasar-dasar Statistik Edisi Ke Tiga*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu. S.P (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siegel, S. (1992). *Statistic Nonparametric Untuk Ilmu-Ilmu Social (Terjemahan Zanzawi Suyuti dan Landung Simatupang*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.